SKRIPSI

KINERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN WAJO DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA TAHUN 2014

(Studi Kasus Desa Salomenraleng Kec. Tempe)

Disusun oleh:
RIA WARDANI
20110520117

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa Negara di sector non-migas. Selain menghasilkan pendapatan bagi Negara, pengembangan obyek wisata juga untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, pariwisata juga merupakan sektor yang multisektoral. Karena dalam sistem yang besar, pengembangan sektor pariwisata dapat berdampak pada sektor lainnya seperti budaya, lingkungan, sosial, politik serta sektor ekonomi.

Di Indonesia, kita dapat merasakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wisatawan internasional terus meningkat sehingga kita dihadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga banyak diminati oleh para wisataan. Untuk itu perlunya mengembangkan sektor pariwisata ditingkat daerah, karena selain meningkatkan produk-produk wisata yang ada di Indonesia juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tesebut sehingga masyarakat dapat mandiri dan meningkatkan pembangunan daerah.

Produk wisata konvensional mulai banyak ditinggalkan dan wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial. Kepuasan wisatawan tidak lagi bersandar pada keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata melainkan juga pada keleluasaan dan intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial.

Sejalan dengan dinamika, gerak dan perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *village tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah.

Dengan demikian, pengembangan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah. Fenomena ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya menurut prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah setempat sampai ke tingkat kesatuan pemerintahan terkecil yaitu desa (UU Nomor 22/1999 UU Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Jenis-jenis pengaturan yang kewenangannya diserahkan kepada desa salah satunya adalah kewenangan pariwisata.

Pemahaman tentang desa wisata cukup beragam antara lain mengatakan adalah suatu bentuk lingkungan permukiman yang memiliki ciri khusus baik alam maupun budaya yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dimana mereka dapat menikmati, mengenal, menghayati dan mempelajari kekhasan desa beserta segala daya tariknya. Dalam pelaksanaannya seringkali wisatawan tinggal di dalam atau dekat dengan

suasana tradisional dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat, sehingga ada proses belajar (*learning*) dari masyarakat kepada wisatawan (*guests*), sehingga para tamu mampu memberikan penghargaan (*rewarding*) kepada nilai-nilai lokal yang masih dianut oleh komunitas setempat.

Wisatawan yang datang ke desa wisata itu akan dapat menikmati alam perdesaan yang masih bersih dan merasakan hidup di suasana desa dengan sejumlah adat istiadatnya. Wisatawan tinggal bersama penduduk, tidur dikamar yang sederhana tapi bersih dan sehat, makanan tradisional merupakan hidangan utama yang hendak disajikan selama di desa wisata, wisatawan merasakan adanya kepuasan karena adanya penyambutan, dan pelayanan dari penduduk desa tersebut.

Pengembangan desa wisata dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pariwisata, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha pengembangan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasar data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2014 Kemenparekraf menargetkan sebanyak 2000 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat sadar wisata, yang memahami potensi wisata yang ada di desanya sehingga dapat dikembangkan sekreatif mungkin untuk menjadi sebuah objek wisata.

Prospek yang menjanjikan dari pengembangan desa wisata terutama melihat *good practice* pengelolaan beberapa desa wisata yang ada di Indonesia, membuat pemerintah daerah turut mengadopsi strategi pembangunan pariwisata ini. Dengan harapan dapat meneladani, bahkan menyaingi keberhasilan yang telah diraih oleh beberapa desa wisata yang telah ada. Namun tidak semua desa wisata yang dibentuk dapat maju seperti contoh praktik baik yang sudah ada. Banyak pula desa wisata belum lama didirikan namun usaha masyarakat tidak berkembang dan kegiatan pariwisata ikut terhenti. Kegagalan tersebut dapat disebabkan karena identifikasi potensi yang kurang tepat, keterbatasan sumber daya, kendala promosi, serta hubungan yang kurang baik antara *stakeholder* desa wisata.

Sebagai respon atas pergeseran minat wisatawan tersebut maka di Indonesia pun tumbuh pilihan wisata baru berupa desa-desa wisata di berbagai provinsi di Indonesia. Dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Wajo, kota yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan ini memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini tentu merupakan peluang untuk meningkatkan produk-produk wisata yang ada.

Salah satu tempat wisata yang sangat potensial untuk dikunjungi di Kabupaten Wajo yakni tempat wisata Danau Tempe. Danau Tempe merupakan danau penghasil ikan air tawar terbesar di dunia. Danau Tempe yang luasnya sekitar 13.000 hektar ini memiliki species ikan air tawar

yang jarang ditemui di tempat lain dan merupakan salah satu danau tektonik di Indonesia. Panorama wisata alam Danau Tempe digunakan masyarakat lokal untuk berbagai festival tahunan seperti *maccera tappareng, mappadendang,* lomba perahu tradisional, dll. Festival tersebut banyak menarik minat wisatawan lokal, wisatawan luar daerah, bahkan wisatawan mancanegara dan menjadi objek pariwisata Kabupaten Wajo. Selain banyaknya spesies ikan air tawar dan keunikan perayaan tahunan di danau tempe, berbagai keunikan lain dapat ditemui salah satunnya adalah di tengah danau banyak jejeran rumah terapung milik nelayan yang dihiasi dengan bendera warna warni. Di atas rumah terapung tersebut, wisatawan dapat menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari pada posisi pandang yang sama. Berbagai jenis bunga air dan jenis burung yang jarang ditemui dapat dengan mudah dijumpai di danau ini. Burung- burung tersebut berpindah dari benua satu ke benua lainnya. Selain itu keindahan alam danau tempe dapat dinikmati dengan menggunakan perahu sambil memancing ikan[1]. Dengan berbagai keunikan dan keindahan alam yang disajikan, danau tempe menjadi salah satu objek wisata yang sangat unik yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain dapat menikmati keindahan alamnya, wisatawan juga dapat menyetujui lebih jauh tentang adat istiadat penduduk setempat, yang tentunya akan menambah pengetahuan akan kekayaan alam Indonesia.

[1] Wisatasulawesi.com/wisata-danau-tempe-unik-dan-menakjubkan/. Diakses pada pukul 21.14 WIB, Desember 15,2015

Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan dari *stakeholder* lain seperti pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki sumber daya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi. Peran dari pemerintah sangat berpengaruh pada keberlangsungan desa wisata, dan memiliki kepentingan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Adapun kepentingan sektor publik adalah untuk mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat yang pada kasus ini diupayakan melalui fasilitasi pengembangan desa wisata.

Minimnya pengetahuan warga tentang pengelolaan pariwisata menjadi kendala. Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh (*comprehensive*) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi kelokasi obyek wisata yang telah meningkatkan permasalahan sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali[2].

Peran yang begitu besar dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku utama dan merupakan *input* dari proses produksi dalam

[2] Akademi Pariwisata Makassar. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab, Wajo*, Makassar, 2015, hlm 49 (Tidak untuk Diterbitkan)

pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Aparatur dalam pemerintahan yang mempunyai kinerja yang baik diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap pemerintah. Kinerja aparatur sangat ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dan memfasilitasi.

Pengembangan pariwisata desa wisata membutuhkan kinerja yang baik dari Pemerintah. Kinerja yang baik dapat diukur melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, serta responsibilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelayanannnya kepada masyarakat. Kinerja yang baik juga sangat penting untuk pengelolaan/pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kinerja dinas pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata, dimana penelitian mengenai hal tersebut sejauh penulis belum pernah dilakukan di Kabupaten Wajo. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul "**Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo Dalam Mengembangkan Desa Wisata Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Salomenraleng Kec. Tempe)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokukan pada satu rumusan masalah yakni, bagaimana kinerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata tahun 2014?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah dalam mengembangkan desa wisata.

b. Manfaaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah daeah dan masyarakat. Khususnya pemerintah daerah dan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab melestarikan objek desa wisata di kabupaten Wajo agar terdorong lebih giat dan meningkatkan kinerja dalam mengelola desa wisata yang ada sehingga dapat menunjang PAD

Kabupaten Wajo untuk mendukung pembangunan dan kemandirian masyarakat setempat.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori ini akan dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagian penelitian yang dilakukan.

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan","unjuk kerja", atau "prestasi".[3]

Bernardin dan Russel mengartikan kinerja sebagai *therecord of outcomes produced on a specified job function or activityduring a specified time period*.[4] Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

---

[3] Yeremis T Keban, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu,* Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm 191.
[4]*Ibid,..,* hlm.192.

Kinerja sebagai *performance*, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.[5]

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut[6] :

1) Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak

[5] Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm 2.
[6] Yeremies T Keban…, *Op.Cit.*,hlm 203.

ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.

2) Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam system penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan system penilaian kinerja.
3) Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
4) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi public terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan penilaian secara tepat dan benar.

Selanjutnya Yuwono dkk mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi,

budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif.[7]

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut:[8]

1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut;
2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi;
3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan ;
4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan;
5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi;
6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

c. Penilaian Kinerja

Menurut Larry D. Stout mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur

[7] Hassel Nogi. *Manajemen Publik.* PT. Gramedia Widiasarana. 2005. Hlm. 179.
[8] *Ibid … hlm. 180.*

pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*missionaccomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.[9]

Pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus, memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi, memastikan tercapaianya skema prestasi yang disepakati, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaanya, memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektifitas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati, menjadikanya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Menurut Dwiyanto penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna

[9] *Ibid ...hlm. 173*

jasa, akuntabilitas dan responsivitas.[10] Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi public seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lainya menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para *stakeholder* juga berbeda-beda.

d. Indikator Kinerja

Mc Donald dan Lawton mengemukakan indikator kinerja antara lain: *output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness*. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2) *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organsiasi.

Lenvinne mengemukakan indikator kinerja terdiri dari: *responsiveness, responsibility, accountability*.[11]

---

[10]Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik.* Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Indonesia. 2006. Hlm 50.

[11] Ratminto dan Winarsih. *Manajemen Pelayanan; Pengembagan Model Konseptual, Penerapan Citizens' Carter dan Standar Pelayanan Minimal,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 174.

1) *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan customers.
2) *Responsibility* atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3) *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Zeithaml, Parasuraman dan Berry menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut :[12]

1) *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
2) *Reliability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3) *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong *customers* dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

[12] *Ibid … hlm. 175-176.*

4) *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada *customers*.

5) Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh *providers* kepada *customers*.

Mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: [13]

1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2) Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

[13] Dwiyanto …, *Op. Cit.* hlm. 50.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivita rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja dinas pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata. Indikator pengukuran kinerja

meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Mendefinisikan Pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.[14]

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara bisa dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu.

Pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*bussines*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan atau

[14] A Yoeti, Oka. *Pengantar Ilmu Pariwisata,* Angkasa Pura. 1990, hlm. 20.

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

b. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang ke suatu tempat/daerah tertentu.[15]

Menjelaskan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan: [16]

1) Obyek wisata dan daya tarik wisata alam

Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.

2) Obyek wisata dan daya tarik budaya

Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.

3) Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus

Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.

---

[15] Marpaung, Happy. *Pengetahuan Kepariwisataan.* Alfabeta, Bandung, 2000, hlm. 13.
[16] Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata.* ANDI. Yogyakarta. 2004, hlm. 23.

c. Wisatawan

Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perjalanan dan pariwisata Internasional di Roma pada tahun 1963 turis atau wisatawan adalah mereka yang melakukan perjalanan lebih dari 24 jam dengan tujuan: [17]

1) *Leisure (recreation, holiday, health, study, religion and sport*).
2) *Bussiness, family, mission, meeting.*

Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata dengan waktu tinggalnya sekurang kurangnya 24 jam di daerah atau negara lain, jika waktu wisata kurang dari 24 jam maka dapat disebut dengan Pelancong. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan melakukan perjalanan wisata apabila perjalanan tersebut bersifat sementara, sukarela dan tidak untuk bekerja.

d. Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata dapat dibedakan sebagai berikut: [18]

1) Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

---

[17] Spillane. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya.* Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 20.
[18] *Ibid … hlm. 28*

2) Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

3) Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.

4) Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori:

a) *Big Sports Event*, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain.

b) *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

5) Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak

memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

6) Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

e. Komponen Perjalanan Wisata

Dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan, lahirlah unsur-unsur atau faktor pendukung yang harus diperhatikan, beberapa komponen dalam kepariwisataan yang diperlukan yaitu sebagai berikut: [19]

1) Sarana Pokok Pariwisata
   a) Biro Perjalanan dan Agen.
   b) Transportasi (Darat, Laut dan Udara).
   c) Restoran
   d) Objek Wisata
   e) Atraksi Wisata (Tradisi atau Budaya Lokal)
2) Sarana Pelengkap Pariwisata
   a) Fasilitas rekreasi dan olahraga
   b) Prasarana umum.
3) Sarana Penunjang kepariwisataan
   a) *Night Club dan Steambath.*
   b) *Casino dan Entertainment.*

[19] Suwantoro, Gamal …*Op Cit. hlm. 15.*

c) *Souvenir Shop, mailing service*

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti, istilah konsepsional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit, dan teori yang kadang kadang masih abstrak, sehingga diperlukan Definisi Operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah penting antara satu konsep dengan konsep yang lain sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun definisi-definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja

   Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

2. Desa Wisata

   Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

3. Kinerja Dinas Pariwisata

Kinerja Dinas Pariwisata dalam meningkatkan wisata Danau Tempe dalam hal ini pemerintah yang merupakan bagian dari pemerintahan di dalam suatu Negara yang berdaulat serta dibentuk secara politik berdasarkan suatu undang-undang yang mempunyai lembaga-lembaga atau badan-badan di dalamnya serta menjalankan roda pemerintahan yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah untuk membuat peraturan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada mengenai bagaimana cara melihat, menggunakan serta mengukur variabel sehingga penelitian benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Produktivitas.
   a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten wajo untuk desa wisatanya,
   b. Peningkatan jumlah pengunjung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub. Pariwisata dan Desa Wisata.
2. Kualitas Layanan
   a. Bentuk Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan Desa Wisata.

b. Kreatifitas dan keterampilan pegawai Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam meningkatkan kualitas layanan.

3. Responsivitas

a. Kemampuan pegawai dalam melayani dan memberikan informasi terhadap masyarakat Desa Wisata.

b. Tanggapan Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata dalam menanggapi kritikan dari masyarakat.

4. Responsibilitas

a. Pencapaian program/ kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;

b. Adanya semangat kerja dari pegawai Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;

c. Pengembangan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk Desa Wisata.

5. Akuntabilitas

a. Komunikasi yang baik antara Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo dan masyarakat Desa Wisata.

b. Adanya suatu pertanggung jawaban dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam pengembangan Desa Wisata Kabupaten Wajo.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang berfungsi sebagai untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sitematis, faktual dan aktual mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. Uraian data dari penjelasan informan, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam mengumpulkan hasil penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di kawasan desa wisata Salomenrale kecamatan Tempe. Didasarkan atas keinginan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kinerja dinas pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang terkait dengan maksud agar penelitian ini dan mampu memberikan informasi serta yang berisi tentang variabel penelitian, data ini dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Meliputi Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Kepala Bidang Dinas Pariwisata, dan staf- staf yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari sumber lain atau diperoleh dari informan secara langsung berupa arsip- arsip, surat kabar, dokumen- dokumen, foto, maupun video yang memiliki data tentang variabel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh berupa data lisan dari berbagai informan melalui percakapan yang sistematis dan terencana. Bentuk wawancara bertahap, dimana wawancara akan dilakukan secara bertahap dan peneliti tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial dari informan. Wawancara akan ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Kepala Bidang Dinas Pariwisata, staf- staf, dan beberapa masyarakat Desa Wisata.

b. Observasi

Observasi adalah usaha pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu melihat secara langsung bagaimana kondisi atau keadaan Desa Wisata pada Kabupaten Wajo khususnya Desa Wisata Salomenraleng. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan mengunjungi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo untuk melihat proses kerja para pegawai.

c. Dokumentasi

Penulis dari segi dokumentasi akan mengumpulkan data-data dari setiap obyek penelitian sebagai informasi tambahan dalam menjawab tujuan penelitian ini. Data-data tersebut bisa berupa arsip laporan pertanggungjawaban, foto, maupun informasi dalam bentuk rekaman

5. Unit Analisis

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2014 maka unit analisisnya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dimana yang dijadikan sebagai informan adalah Kepala Dinas, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Desa Wisata setempat dan masyarakat Desa Wisata.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan deskripsi situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisa data yang diperoleh akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehinga akan menjadi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya.

Langkah yang perlu dilakukan adalah dalam proses analisa data adalah analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[20] Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi atau rangkuman inti. Setelah itu kemudian menyusun menjadi satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan dengan membuat koding.

Tahap terakhir dari analisa adalah mengadakan keabsahan data. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu tang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan tringulasi data. Triangulasi data ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dari subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai obyek penelitian. Menurut penulis sendiri, dengan menggunakan triangulasi data sudah cukup mewakili dalam menjawab tujuan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, **Pendahuluan** : Bab ini terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat, Kerangka dasar teori, Definisi konsepsional, Definisi operasional dan Metode penelitian

[20] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja. Bandung. 1995, hlm. 3.

Bab II, **Deskripsi Wilayah Penelitian** : Dalam bab ini terdiri dari Gambaran umum Kabupaten Wajo, Profil Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, serta Deskripsi desa wisata di Kabupaten Wajo

Bab III, **Pembahasan** : Dalam bab ini akan dibahas kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan desa wisata 2014-2015

Bab IV, **Penutup** : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitianakan ditambahkan saran dan rekomendasi kepada pemerintah khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata